

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Brithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PukAP Indonesia.
- Kuat, P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia . *Perspektif Yuridis Filosoifs dalam Penegakan Hukum In Concreto*, hal. 411.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mansyur, R. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Masinambow, E. (2003). *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Masyur, R. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Ysutisia Indonesia.

- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakir. (2005). *Viktimologi : Studi Kasus di Indonesia* . Surabaya: Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI .
- Mudzakir. (2007). *Alternative Dispute Resolution (ADR) : Penyelsaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Makalah Workshop.
- Mudzakir. (2014). *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Makassar: Dua Satu Press.
- Priyo, S. (2020). Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur,Kulonprogo). *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No.2* , hal. 97.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Redaksi Sinar Grafika. (2013). *Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rustan. (2014). *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan* . Makassar: Dua Satu Press.
- Soeroso. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* . Jakarta: Grainedia.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Anesha.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 Tentang Penerapan Restorative Justice.

C. JURNAL

Bachri, N. A. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin*, hal.10.

E, T. (2009). *Psikologi Kekerasan / Child Abuse*. Jakarta: Harian Pikiran Rakyat.

Mudzakkir. (2001). Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Disertasi dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, hal.180.

Ni Putu Melinia, A.A Ngurah Oka. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Body Shaming. *Udayana Master Law Journal Vol.8 No.4*.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi selaku Penyidik Polres Bojonegoro pada tanggal 31 Januari 2022.

Wawancara dengan AKP Frans Dalanta Kembaren selaku Kasatreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 31 Januari 2022.

E. LAIN-LAIN

Bojonegoro, K. R. (n.d.). *Polres Bojonegoro*. Retrieved Oktober 23, 2021, from Astuti: <https://polresbojonegoro.id>

Frehsee, D. (n.d.). *Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law : Development and Theoretical Implications*. Retrieved November Sabtu, 2021, from <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.html>

Hartoyo, A. (2021, Januari 6). *Penjelasan dan Tafsir Pasal 170 KUHP* . Retrieved Oktober 22, 2021, from Advokindo: <https://advokindo.com/penjelasan-dan-tafsir-pasal170-KUHP>

S, M. (2011, April 14). *Penyertaan (Deelneming) Dalam Hukum Pidana* . Retrieved Oktober 22, 2021, from blogspot: <https://zriefmaronie.blogspot.com/2011/04/penyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana.html>

Susianti. (2017). *Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*. hal.12.